

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Tahun 2024-2026 dan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bapenda Tahun 2024. Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan kebutuhan kinerja yang dilaksanakan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

Semoga Renja Bapenda Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2024 dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



DR. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b

Nip: 19820306 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..	41
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5. Penelaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	60
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	61
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	64
BAB V PENUTUP	81
5.1. Catatan Penting	81
5.2. Kaidah Pelaksanaan	82
5.3. Rencana Tindak Lanjut	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapenda dan Pencapaian Renstra Bapenda Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan.....	12
Tabel 2	Target dan Realisasi APBD Pendapatan Daerah TA. 2022-2023	35
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	39
Tabel 4	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	45
Tabel 5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
Tabel 6	Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	62
Tabel 7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Mau Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	65
Tabel 8	Target Pendapatan Daerah Bapenda Tahun 2024	93
Tabel 9	Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bapenda ...	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsis, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukann terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 9Renja) Perangkat Daerah.

Renja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untu periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Bapenda itu sendiri. Penyusunan Rancangan awal Renja tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, hasil evaluasi renja Bapenda tahun lalu, dan hasil evaluasi renja tahun berjalan.

Dengan berpedoman pada Renstra, yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi Pencapaian sasaran Renstra Bapenda.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Persiapan penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Bapenda tentang pembentukan tim penyusun Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
- b. Orientasi mengenai Renja Bapenda;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Bapenda;
- b. Hasil evaluasi Renja Bapenda tahun lalu.

Hasil perumusan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 disajikan dengan sistematika:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renda Bapenda;
- c. Tujuan dan Sasaran Bapenda;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda;
- e. Penutup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2022;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 23. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu:

1. Menganalisis gambaran pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Menelaah hasil evaluasi Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menelaah tujuan dan sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

1.3 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023);
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun-tahun sebelumnya;
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu, dan realisasi Renstar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan/ atau realisasi APBD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Berisi uraian mengenai perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusann program, kegiatan, dan subkegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan, dan penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB V. PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.